



Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Yesi Veronika Simarmata¹, Pany Iglesia M Simamora², Joko Suharianto³

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia^{1,2,3}

*Email: yesyveronicasimarmata@gmail.com¹, iglesiamarsyauli@gmail.com², djoko@unimed.ac.id³

Diterima: 05-10-2026 | Disetujui: 11-10-2026 | Diterbitkan: 13-10-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Average Years of Schooling, economic growth, and government spending on the poverty rate in 33 regencies/cities in North Sumatra Province during 2020–2024. The study employs a quantitative approach using panel data sourced from the Central Statistics Agency and local government spending data. The data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews 10. Based on the Chow test and Hausman test, the Fixed Effect Model (FEM) was selected as the most appropriate model. The results show that Average Years of Schooling has a negative and significant effect on poverty, while economic growth has a negative but insignificant effect. Government spending also has a negative and significant effect on the poverty rate. Simultaneously, the three variables have a significant effect on poverty. The R-squared value of 0.990207 indicates that the model is able to explain 99.02 percent of the variation in the poverty rate, while the remaining 0.98 percent is explained by factors outside the model. These findings highlight the importance of improving education and managing government spending in supporting poverty reduction efforts in North Sumatra.

Keywords: Average Years of Schooling; Economic Growth; Government Spending; Poverty; Panel Data.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik serta data belanja pemerintah daerah. Pengolahan data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 10. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Belanja pemerintah juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai R-squared sebesar 0,990207 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 99,02 persen perubahan tingkat kemiskinan, sementara 0,98 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan pendidikan dan pengelolaan belanja pemerintah dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara.

Katakunci: Rata-Rata Lama Sekolah; Pertumbuhan Ekonomi; Belanja Pemerintah; Kemiskinan; Data Panel.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Simarmata, Y. V., Simamora, P. I. M., & Suharianto, J. . (2026). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(4), 4235-4253. <https://doi.org/10.63822/wf4qy493>

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraannya. Kemiskinan tidak hanya menunjukkan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses terhadap berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Permasalahan kemiskinan juga memiliki karakteristik yang berbeda antarwilayah karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, serta kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan manfaat secara merata.

Salah satu faktor yang berkaitan dengan kemiskinan adalah kualitas pendidikan masyarakat yang dapat dilihat melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS menunjukkan jumlah tahun yang telah ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi RLS, semakin besar kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas serta peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian Sephia dan Chandriyanti (2024) yang menemukan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil yang sejalan juga ditunjukkan oleh penelitian Syifa Ariana dan M. Afdal Samsuddin (2024) di Sumatera Selatan yang menemukan bahwa indikator pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, meskipun pengaruhnya dapat berbeda bergantung pada karakteristik wilayah dan indikator pendidikan yang digunakan.

Selain pendidikan, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan perubahan tingkat kemiskinan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara langsung memberikan manfaat yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak disertai pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi, masyarakat berpendapatan rendah dapat tetap berada dalam kondisi miskin. Hal tersebut terlihat dalam beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan temuan berbeda. Sephia dan Chandriyanti (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Syifa Ariana dan M. Afdal Samsuddin (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan. Sebaliknya, Murjani Adi Perkasa dan Syahrutuah Siregar (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaan hasil

tersebut menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan masih perlu dikaji berdasarkan karakteristik wilayah dan periode penelitian yang berbeda.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila belanja pemerintah diarahkan secara tepat dan efektif kepada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat berpendapatan rendah, peningkatan belanja tersebut dapat membantu menurunkan kemiskinan. Putri dan Yefriza (2025), melalui penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, menemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah berpotensi mendukung penurunan kemiskinan. Namun, hasil penelitian Potale, Dai, dan Santoso (2024) di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan hasil yang lebih beragam. Belanja fungsi ekonomi dan belanja fungsi pendidikan ditemukan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan belanja fungsi perlindungan sosial dan belanja fungsi pariwisata dan budaya berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya belanja pemerintah saja belum tentu menjamin penurunan kemiskinan karena dampaknya juga bergantung pada jenis, arah, efektivitas, dan ketepatan sasaran belanja yang dilakukan.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji di Provinsi Sumatera Utara karena karakteristik sosial dan ekonomi antarwilayahnya cukup beragam. Perbedaan kondisi pendidikan, aktivitas ekonomi, kemampuan fiskal daerah, serta karakteristik wilayah menyebabkan tingkat kemiskinan tidak tersebar secara merata. Berdasarkan data penelitian yang mencakup 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020–2024, perkembangan rata-rata kemiskinan, RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah Daerah pada 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024

Tahun	Kemiskinan (%)	RLS (Tahun)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Belanja Pemerintah Daerah
2020	10,77	9,08	-0,13	Rp1,25 triliun
2021	11,04	9,18	2,73	Rp1,27 triliun
2022	10,31	9,29	4,18	Rp1,37 triliun
2023	9,90	9,39	4,62	Rp1,44 triliun
2024	9,73	9,53	4,68	Rp1,50 triliun

Sumber: Data penelitian, diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata tingkat kemiskinan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan selama periode penelitian. Pada tahun 2020 rata-rata kemiskinan sebesar 10,77

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
(Sinarmata, et al.)

persen dan meningkat menjadi 11,04 persen pada tahun 2021. Setelah itu, rata-rata kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 9,73 persen pada tahun 2024. Pada periode yang sama, RLS menunjukkan perkembangan yang konsisten meningkat dari 9,08 tahun pada 2020 menjadi 9,53 tahun pada 2024. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan setelah tahun 2020, yaitu dari -0,13 persen menjadi 4,68 persen pada tahun 2024. Sementara itu, rata-rata belanja pemerintah daerah meningkat dari sekitar Rp1,25 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,50 triliun pada tahun 2024. Perkembangan tersebut secara deskriptif menunjukkan adanya pola yang menarik, yaitu ketika RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah meningkat setelah tahun 2021, rata-rata kemiskinan cenderung menurun. Namun, pola tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh karena hubungan antarvariabel perlu dibuktikan melalui analisis ekonometrika.

Selain menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, data penelitian juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah. Pada tahun 2023, Kabupaten Deli Serdang memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,44 persen, sedangkan Kabupaten Nias Barat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 26,42 persen pada tahun 2021. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Sumatera Utara tidak dapat dilihat hanya berdasarkan rata-rata provinsi, tetapi perlu memperhatikan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, penggunaan data panel menjadi relevan karena dapat mempertimbangkan variasi antarwilayah sekaligus perubahan antarwaktu.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, tetapi masih ditemukan perbedaan hasil. Sephia dan Chandriyanti (2024) menunjukkan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Syifa Ariana dan M. Afdal Samsuddin (2024) juga menemukan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, tetapi tidak signifikan, sementara indikator pendidikan menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan. Di sisi lain, Murjani Adi Perkasa dan Syahrutuah Siregar (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum selalu menghasilkan penurunan kemiskinan secara langsung.

Pada aspek kebijakan fiskal, Putri dan Yefriza (2025) menemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Potale, Dai, dan Santoso (2024) yang menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan berbeda menurut fungsi belanja. Selain itu, penelitian terdahulu juga banyak menggunakan kombinasi variabel yang berbeda, seperti pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, maupun komponen belanja pemerintah tertentu. Perbedaan hasil dan variabel tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk melakukan penelitian yang menguji RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah secara bersama-sama terhadap kemiskinan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan pada wilayah, periode, kombinasi variabel, dan unit analisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 dengan menggunakan RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah sebagai variabel independen serta tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Penggunaan data panel memungkinkan penelitian untuk menangkap perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota sekaligus perubahan kondisi selama periode penelitian. Dengan demikian, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai faktor pendidikan, perkembangan ekonomi, dan kebijakan fiskal daerah dalam menjelaskan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Sejalan dengan permasalahan tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah: H1 RLS berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan; H2 pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan; H3 belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan; dan H4 RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai determinan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan efektivitas belanja pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder dalam bentuk data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross-section), sehingga dapat digunakan untuk mengamati perkembangan beberapa wilayah selama periode tertentu. Pendekatan regresi data panel juga digunakan dalam penelitian Manihuruk dan Suhianto (2024) untuk menganalisis kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia dengan data tahun 2018–2022. Penelitian tersebut menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan menetapkan Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan uji Chow dan uji Hausman.

Cakupan penelitian ini meliputi 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024, sehingga diperoleh 165 unit pengamatan. Seluruh data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi resmi dan basis data statistik yang tersedia. Penggunaan data sekunder BPS dalam penelitian kemiskinan dengan pendekatan regresi data panel juga diterapkan oleh Riyandini et al. (2024) dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua. Penelitian tersebut menggunakan data kabupaten/kota selama periode 2017–2020 dan mengolahnya dengan regresi data panel menggunakan EViews 12SV.

Variabel penelitian terdiri atas tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat (Y) dan tiga variabel bebas, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai X_1 , Pertumbuhan Ekonomi sebagai X_2 , dan Belanja Pemerintah sebagai X_3 . Tingkat kemiskinan dinyatakan dalam persentase, RLS dalam satuan tahun, dan pertumbuhan ekonomi dalam persentase. Sementara itu, belanja pemerintah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural atau LOG(BP). Transformasi tersebut digunakan untuk mengurangi perbedaan

skala yang cukup besar pada data belanja pemerintah sehingga data lebih sesuai untuk digunakan dalam model regresi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dari publikasi dan basis data BPS. Data yang dikumpulkan meliputi tingkat kemiskinan, RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah pada setiap kabupaten/kota selama periode 2020–2024. Selanjutnya, data disusun berdasarkan wilayah dan tahun pengamatan sehingga membentuk data panel yang seimbang (balanced panel).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Pemilihan regresi data panel didasarkan pada karakteristik penelitian yang mengamati 33 kabupaten/kota dalam beberapa tahun. Pendekatan yang serupa digunakan oleh Parawansa, Harahap, dan Tambunan (2024) dalam menganalisis tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut menggunakan regresi data panel serta uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model estimasi yang sesuai dan memperoleh Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terpilih.

Dalam regresi data panel terdapat tiga alternatif model, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Penentuan model yang paling sesuai dalam penelitian ini dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan antara CEM dan FEM, sedangkan uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM. Penggunaan kedua pengujian tersebut juga diterapkan oleh Riyandini et al. (2024) dalam penelitian mengenai kemiskinan di Provinsi Papua, yang menghasilkan FEM sebagai model terbaik.

Hasil uji Chow dalam penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga FEM dipilih dibandingkan CEM. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0039. Karena nilai probabilitas tersebut juga lebih kecil dari 5 persen, maka FEM lebih tepat digunakan dibandingkan REM. Dengan demikian, Fixed Effect Model ditetapkan sebagai model estimasi untuk menganalisis pengaruh RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Bentuk model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{RLS}_{it} + \beta_2 \text{PE}_{it} + \beta_3 \text{LOG}(\text{BP})_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KEMISKINAN_{it} = tingkat kemiskinan kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi masing-masing variabel bebas

RLS_{it} = rata-rata lama sekolah kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t

PE_{it} = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t

$\text{LOG}(\text{BP})_{it}$ = logaritma natural belanja pemerintah kabupaten/kota ke-i pada tahun ke-t

ε_{it} = kesalahan pengganggu

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model terlebih dahulu diperiksa melalui pengujian asumsi yang diperlukan. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antarvariabel bebas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual model. Pemeriksaan asumsi tersebut juga digunakan dalam penelitian

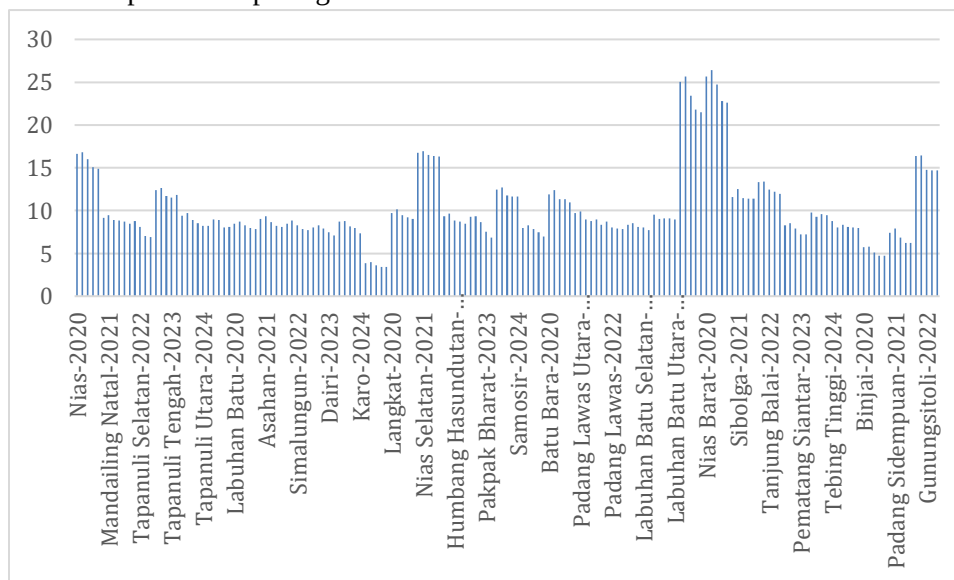
Riyandini et al. (2024) setelah pemilihan model regresi data panel untuk memastikan kelayakan model sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh RLS, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Penggunaan pengujian parsial, simultan, dan koefisien determinasi dalam model FEM juga diterapkan pada penelitian Manihuruk dan Suhariato (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024

Sumber: Data penelitian, diolah, 2026.

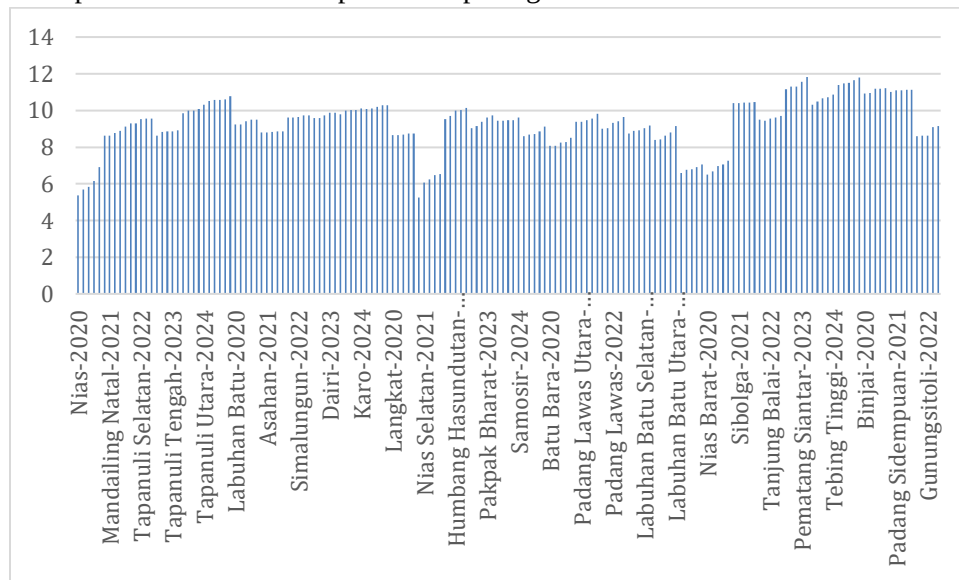
Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan selama periode 2020–2024. Rata-rata kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 10,77 persen, meningkat menjadi 11,04 persen pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 10,31 persen pada tahun 2022, 9,90 persen pada tahun 2023, dan 9,73 persen pada tahun 2024. Pada tingkat kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi selama periode pengamatan terdapat di Kabupaten Nias Barat pada tahun 2021 sebesar 26,42 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Deli

Serdang pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 3,44 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup besar antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021. Rata-rata kemiskinan turun dari 11,04 persen pada tahun 2021 menjadi 9,73 persen pada tahun 2024.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Adapun perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024

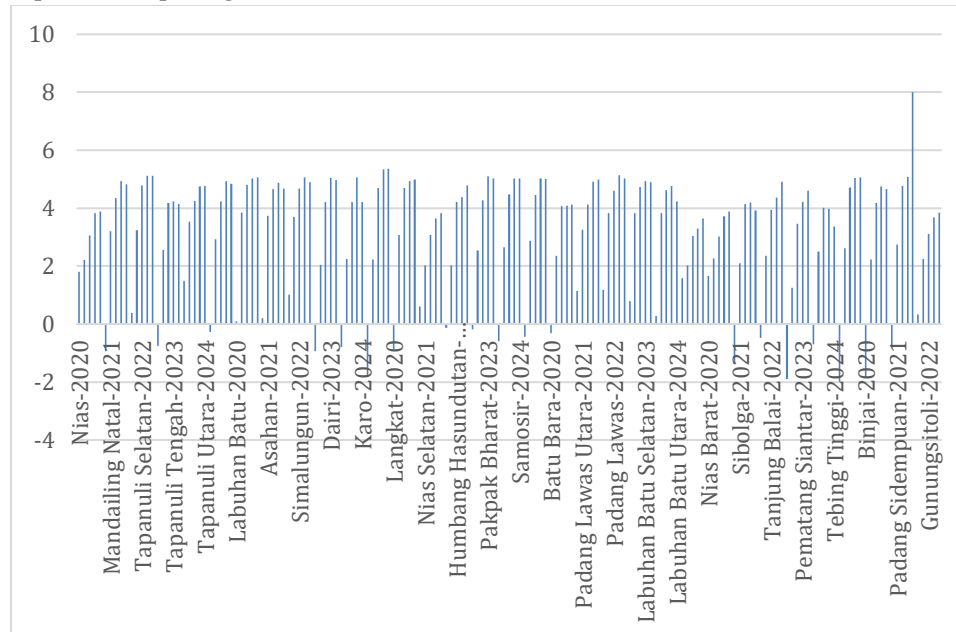
Sumber: Data penelitian, diolah, 2026.

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa rata-rata RLS di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020–2024. Rata-rata RLS pada tahun 2020 sebesar 9,08 tahun, kemudian meningkat menjadi 9,18 tahun pada tahun 2021, 9,29 tahun pada tahun 2022, 9,39 tahun pada tahun 2023, dan mencapai 9,53 tahun pada tahun 2024. Pada tingkat kabupaten/kota, RLS terendah selama periode pengamatan terdapat di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 sebesar 5,25 tahun, sedangkan RLS tertinggi terdapat di Kota Pematang Siantar pada tahun 2024 sebesar 11,82 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan capaian pendidikan antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Secara keseluruhan, RLS di 33 kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Rata-rata RLS meningkat dari 9,08 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,53 tahun pada tahun 2024.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024

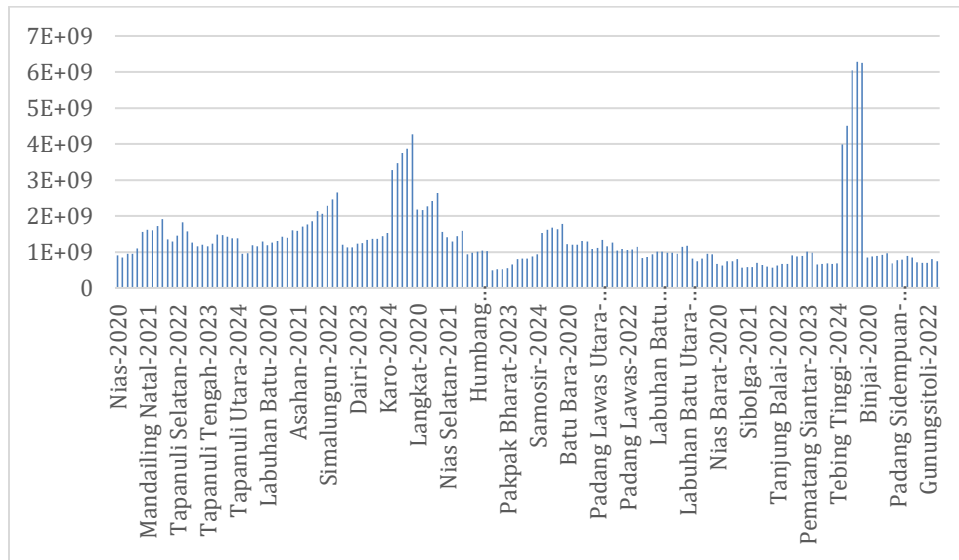
Sumber: Data penelitian, diolah, 2026.

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan selama periode 2020–2024. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -0,13 persen, kemudian meningkat menjadi 2,73 persen pada tahun 2021, 4,18 persen pada tahun 2022, 4,62 persen pada tahun 2023, dan mencapai 4,68 persen pada tahun 2024. Pada tingkat kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode pengamatan terdapat di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2024 sebesar 8,01 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terdapat di Kota Medan pada tahun 2020 sebesar -1,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara masih beragam.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan meningkat setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari -0,13 persen pada tahun 2020 menjadi 4,68 persen pada tahun 2024.

Perkembangan Belanja Pemerintah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan belanja pemerintah di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4. Perkembangan Belanja Pemerintah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2024

Sumber: Data penelitian, diolah, 2026.

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa rata-rata belanja pemerintah di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan selama periode 2020–2024. Rata-rata belanja pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp1,25 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,27 triliun pada tahun 2021, Rp1,37 triliun pada tahun 2022, Rp1,44 triliun pada tahun 2023, dan mencapai Rp1,50 triliun pada tahun 2024. Pada tingkat kabupaten/kota, nilai belanja pemerintah menunjukkan adanya perbedaan antarwilayah selama periode pengamatan. Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa kemampuan dan kebutuhan belanja pemerintah di masing-masing kabupaten/kota tidak sama.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Rata-rata belanja pemerintah meningkat dari Rp1,25 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,50 triliun pada tahun 2024.

2.Hasil Regresi Data Panel Uji Pemilihan Model

1.Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	153.571289	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	604.889965	32	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 10, 2026.

Hasil pengujian menunjukkan nilai Cross-section F sebesar 153,571289 dengan probabilitas 0,0000, serta nilai Cross-section Chi-kuadrat sebesar 604,889965 dengan probabilitas 0,0000. Karena kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini bermakna terdapat perbedaan karakteristik yang nyata di antara ke-33 kabupaten/kota yang diteliti, sehingga Model Efek Tetap (FEM) lebih tepat dipilih dibandingkan Model Efek Umum (CEM). Dengan demikian, Uji Chow mengonfirmasi bahwa FEM merupakan model yang sesuai untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020–2024.

2.Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.387364	3	0.0039

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan Uji Hausman (Correlated Random Effects – Hausman Test), diperoleh nilai Statistik Chi-Kuadrat sebesar 13,387364 dengan derajat kebebasan (df) = 3 dan nilai probabilitas sebesar 0,0039. Karena probabilitas $0,0039 < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Hal ini bermakna terdapat perbedaan yang nyata antara hasil estimasi Model Efek Tetap (FEM) dan Model

Efek Acak (REM). Oleh karena itu, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Model Efek Tetap (FEM) dibandingkan Model Efek Acak (REM).

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

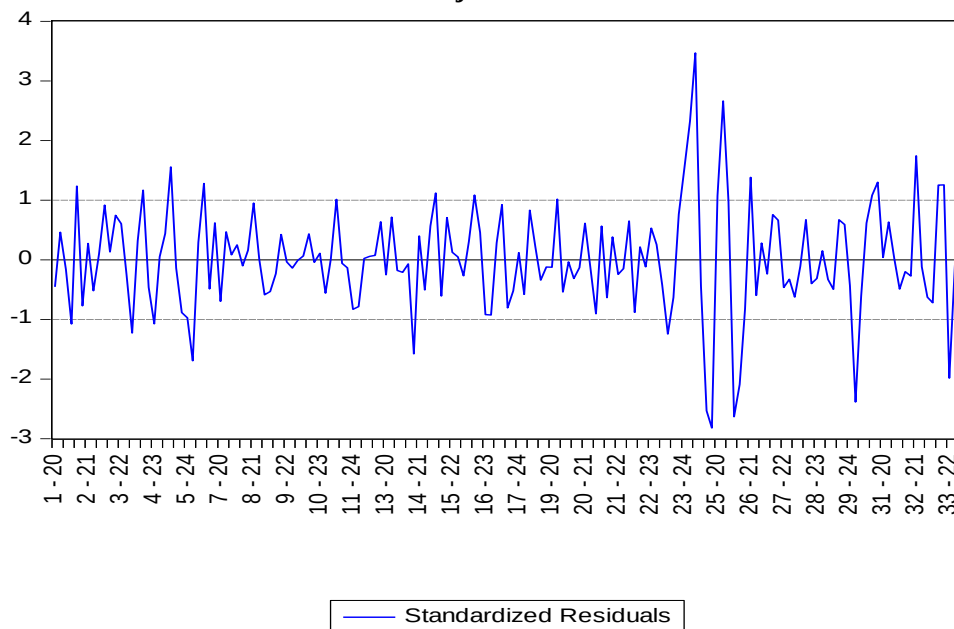
	RLS	PE	LOG(BP)
RLS	1.000000	0.109507	0.139162
PE	0.109507	1.000000	0.146760
LOG(BP)	0.139162	0.146760	1.000000

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 10, 2026.

Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,109507 antara RLS dan PE, 0,139162 antara RLS dan LOG(BP), serta 0,146760 antara PE dan LOG(BP). Keseluruhan nilai tersebut jauh di bawah batas ambang 0,90, sehingga tidak ditemukan hubungan korelasi yang kuat antarvariabel bebas. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas yang bermakna.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan grafik Residu Terskala, seluruh nilai residu berada dalam rentang yang ditetapkan, yaitu di atas -500 dan di bawah 500. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran residu tidak melampaui batas

yang ditentukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4.Uji Hipotesis Fixed Effect Model

Tabel 6. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/03/26 Time: 22:06				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	78.87568	12.85654	6.135062	0.0000
RLS	-1.273477	0.250504	-5.083668	0.0000
PE	-0.024714	0.027465	-0.899846	0.3699
LOG(BP)	-2.710250	0.638658	-4.243665	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.990207	Mean dependent var	10.35018	
Adjusted R-squared	0.987550	S.D. dependent var	4.454426	
S.E. of regression	0.497033	Akaike info criterion	1.629909	
Sum squared resid	31.86837	Schwarz criterion	2.307570	
Log likelihood	-98.46752	Hannan-Quinn criter.	1.904995	
F-statistic	372.6618	Durbin-Watson stat	1.521543	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan hasil estimasi dengan Model Efek Tetap (FEM), penelitian ini mencakup 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2020–2024, sehingga diperoleh total 165 pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki koefisien regresi sebesar $-1,273477$ dengan tingkat peluang sebesar 0,0000. Karena nilai ini lebih kecil dari taraf nyata 0,05, dapat disimpulkan bahwa RLS berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan. Tanda negatif pada koefisien mengindikasikan bahwa perpanjangan rata-rata lama sekolah cenderung menurunkan angka kemiskinan. Secara kuantitatif, setiap kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar satu tahun akan menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 1,273 poin persentase, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah.

Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), diperoleh nilai koefisien sebesar $-0,024714$ dengan peluang sebesar 0,3699. Angka tersebut lebih besar dari 0,05, artinya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kemiskinan. Meskipun arah koefisien menunjukkan hubungan negatif, hubungan tersebut belum cukup kuat secara statistik. Dengan kata lain, kenaikan pertumbuhan ekonomi cenderung beriringan dengan penurunan kemiskinan, namun pengaruh tersebut belum dapat dibuktikan kebermaknaannya dalam model ini.

Sementara itu, variabel Belanja Pemerintah dalam bentuk logaritma natural LOG(BP) menghasilkan koefisien sebesar $-2,710250$ dengan peluang $0,0000$. Nilai ini jauh di bawah taraf $0,05$, sehingga belanja pemerintah terbukti berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Tanda negatif bermakna bahwa peningkatan belanja pemerintah diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Mengingat variabel ini telah ditransformasikan ke bentuk logaritma, kenaikan belanja pemerintah sebesar 1 persen berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar sekitar $0,0271$ poin persentase, apabila variabel lain dianggap tetap.

Secara keseluruhan, nilai statistik F sebesar $372,6618$ dengan peluang $0,0000$ membuktikan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah secara serentak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun pertumbuhan ekonomi tidak bermakna jika dilihat secara terpisah, ketiga variabel tersebut tetap bersama-sama mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan.

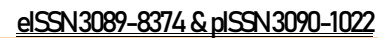
Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar $0,990207$ bermakna bahwa $99,02$ persen perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel beserta karakteristik khas masing-masing kabupaten/kota yang tertampung dalam model. Sisanya, yaitu sekitar $0,98$ persen, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Nilai R^2 yang telah disesuaikan (Adjusted R-squared) sebesar $0,987550$ juga mengonfirmasi bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemiskinan tetap sangat tinggi setelah memperhitungkan jumlah variabel penjelas yang digunakan.

5. Individual Effect

Tabel 7. Hasil Estimasi Individual Effect

	CROSSID	Effect
1	1	0.706130
2	2	-0.988333
3	3	-1.664118
4	4	1.101706
5	5	0.095769
6	6	-0.414684
7	7	-1.687691
8	8	-1.272117
9	9	0.177195
10	10	-2.012206
11	11	-0.792967
12	12	-2.419127
13	13	0.255093
14	14	2.712569
15	15	-1.067755
16	16	-3.995930
17	17	1.047533
18	18	-2.388651
19	19	0.007611
20	20	-0.769623
21	21	-2.428147
22	22	-3.265481
23	23	-2.328819
24	24	9.071193
25	25	9.671075
26	26	0.970717
27	27	0.919693
28	28	-0.471833
29	29	-0.832737
30	30	4.693328
31	31	-3.594804
32	32	-2.191058
33	33	3.156466

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 10, 2026.

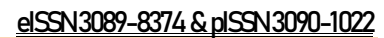


Nilai efek yang positif bermakna bahwa karakteristik khusus wilayah tersebut cenderung menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi rata-rata model. Sementara itu, nilai efek yang negatif menunjukkan karakteristik wilayah yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah. Perbedaan nilai efek ini menegaskan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki ciri khas tersendiri yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, di samping pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah yang sudah dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sephia dan Chandriyanti (2024) yang menemukan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan RLS dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian di Provinsi Sumatera Utara memperkuat temuan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki koefisien sebesar -0,024714 dengan nilai probabilitas 0,3699. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga PE tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024. Meskipun koefisien menunjukkan arah negatif, hasil tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nyata dapat menurunkan tingkat kemiskinan.



Hasil penelitian ini sejalan dengan Ariana dan Samsuddin (2024) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sephia dan Chandriyanti (2024), yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun arah pengaruh dalam penelitian tersebut positif. Selain itu, penelitian terdahulu pada JIEP juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum selalu mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, karena dampaknya dapat dipengaruhi oleh pemerataan hasil pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), Belanja Pemerintah memiliki koefisien sebesar -2,710250 dengan nilai probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024. Artinya, peningkatan belanja pemerintah cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Karena variabel Belanja Pemerintah dalam model menggunakan bentuk logaritma, hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara peningkatan belanja pemerintah dan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Yefriz (2025) yang menemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Florenica dan Febriani (2022) yang menunjukkan bahwa government spending berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan apabila dialokasikan secara tepat dan efektif.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah secara Simultan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai F-statistic sebesar 372,6618 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan satu faktor saja, tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor secara bersamaan. Peningkatan pendidikan melalui RLS dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dapat memperluas aktivitas dan kesempatan ekonomi, sedangkan belanja pemerintah dapat mendukung penyediaan pelayanan publik dan berbagai program pembangunan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama dapat berperan dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengelolaan belanja pemerintah yang tepat dan efektif.

Kemampuan Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah dalam Menjelaskan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai R-squared sebesar 0,990207. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 99,02 persen variasi tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024. Sementara itu, sebesar 0,98 persen variasi tingkat kemiskinan dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Nilai R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan selama periode pengamatan. Dengan demikian, ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang kuat dalam menerangkan perubahan tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan dan kebijakan fiskal daerah memiliki peran yang penting dalam menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan. Rata-Rata Lama Sekolah terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah hubungan negatif, tetapi pengaruhnya terhadap kemiskinan belum terbukti signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum secara otomatis memberikan dampak yang merata terhadap masyarakat berpendapatan rendah. Sementara

itu, belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan belanja yang tepat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara simultan, Rata-Rata Lama Sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan serta pengelolaan belanja pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan secara terpadu agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di berbagai kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, S., & Samsuddin, M. A. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tahun pendidikan yang diharapkan, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan. *Media Ekonomi*, 24(2), 71–79. <https://doi.org/10.30595/medek.v24i2.22146>
- Florennica, E., & Febriani, R. E. (2022). Do financial deepening, government spending, and unemployment benefit poverty reduction in Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 193–204. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18610>
- Manihuruk, F. E., & Suhianto, J. (2024). Analisis pengaruh IPM, TPT, dan UMR terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan menggunakan regresi data panel. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 18(2), 246–258. <https://doi.org/10.19184/jpe.v18i2.47262>
- Murjani Adi Perkasa, M., & Siregar, S. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, angka partisipasi kasar, dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015–2019. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.20527/jiep.v7i1.70>
- Parawansa, K., Harahap, I., & Tambunan, K. (2024). Pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015–2020. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1). <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v5i1.5702>
- Potale, A., Dai, S. I. S., & Santoso, I. (2024). Analisis struktur belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 93–105. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v17i2.27313>
- Putri, C., & Yefriza. (2025). Pengaruh belanja pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 266–275. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1859>
- Riyandini, M. K., Virgantari, F., & Farida, Y. E. (2024). Penerapan model regresi data panel dalam analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal EurekaMatika*, 12(2), 119–130. <https://doi.org/10.17509/jem.v12i2.74235>
- Sephia, S., & Chandriyanti, I. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 7(2), 506–513. <https://doi.org/10.20527/jiep.v7i2.220>